Analisis Dinamika Politik: Relasi Jokowi dan Jusuf Kalla

Category: POLITIK
written by Redaksi | April 24, 2026

Peta politik Indonesia pasca-Pemilu 2024 terus menunjukkan dinamika yang kompleks. Hubungan antara tokoh-tokoh sentral, khususnya antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo ([Jokowi]) dan mantan Wakil Presiden [Jusuf Kalla] (JK), kembali menjadi sorotan publik.

Ketegangan narasi mengenai sejarah dukungan politik antar keduanya mencerminkan fluiditas aliansi dalam politik nasional.

Ketegangan yang terjadi antara pihak Jusuf Kalla dan Joko Widodo berakar pada perbedaan pandangan mengenai siapa yang lebih berperan dalam meniti tangga kekuasaan masing-masing. Di satu sisi, terdapat klaim yang menyoroti peran JK dalam awal karier kepresidenan Jokowi.

Di sisi lain, kubu Jokowi menegaskan bahwa dukungan publik dan basis massa lah yang menjadi faktor penentu utama, seraya menampik narasi bahwa Jokowi sekadar menumpang popularitas pihak tertentu.

Ketidaksamaan persepsi ini memuncak dalam berbagai polemik publik, termasuk isu verifikasi ijazah yang sempat mencuat. Analis politik menilai bahwa perbedaan gaya komunikasi antara kedua tokoh ini menciptakan celah yang semakin lebar.

Sementara Jokowi cenderung merespons dengan sikap yang datar dan tidak reaktif, pihak JK dinilai lebih terbuka dalam mengekspresikan kritik terhadap arah komunikasi pemerintahan.

Beberapa pengamat menilai bahwa perbedaan nasib dalam "pertarungan narasi" ini terletak pada strategi komunikasi yang digunakan.

Ada pandangan yang menyebut Jokowi menerapkan strategi ganda kombinasi pendekatan langsung dan mobilisasi pendukung di akar rumput yang dianggap sangat efektif dalam mengonsolidasi opini publik.

Sebaliknya, pendekatan yang dilakukan JK dianggap kurang mampu mengimbangi kecepatan arus informasi pendukung Jokowi.

Hal ini menciptakan kesan bahwa dalam arena komunikasi politik saat ini, JK menghadapi tantangan yang cukup berat untuk menggalang kembali posisi tawarnya secara strategis.

Dinamika hubungan Jokowi dan JK ini turut menjadi alarm bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pergeseran loyalitas dan manuver politik para aktor kunci masa lalu menjadi variabel yang harus dikelola dengan hati-hati.

Selain itu, muncul wacana di kalangan masyarakat sipil dan aktivis politik terkait kebijakan-kebijakan baru, seperti isu amnesti atau abolisi terhadap beberapa tokoh politik (seperti Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong).

Kebijakan ini memicu reaksi beragam dari pendukung Jokowi yang kini berada di luar lingkaran kekuasaan inti.

Munculnya kritik dari kelompok civil society dan akademisi, seperti Saiful Mujani dan Feri Amsari, mengenai arah kebijakan pemerintahan saat ini, menambah lapisan kompleksitas baru.

Bagi pemerintahan Prabowo, mengelola “cinta lama yang bersemi kembali” antara tokoh-tokoh yang dulunya saling berhadapan atau kini saling bersengketa merupakan tantangan stabilitas yang memerlukan pendekatan politik yang presisi.

Di tengah lanskap politik yang penuh dengan volatilitas, kemampuan pemerintah dalam menjaga komunikasi lintas faksi akan menjadi penentu apakah stabilitas nasional dapat tetap terjaga atau justru akan menghadapi turbulensi politik yang lebih intens.[]